

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Pemikiran

##### 1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam konteks pembangunan bangsa.

Keadaan penduduk Indonesia sampai tanggal 30 Oktober 1990 berjumlah 179.321.640 orang, 69% di antaranya bermukim di daerah pedesaan yang sebagian besar pekerjaan mereka sebagai petani (Kompas 2 dan 8 Januari 1991). Jika dikaji dari aspek sumber daya manusia, jumlah yang cukup besar ini merupakan modal potensial dalam pembangunan. Itulah sebabnya, keberhasilan pembangunan yang dicita-citakan hanya dapat dicapai apabila kualitas sumber daya manusiannya dapat dibina, dikembangkan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Kualitas sumber daya manusia yang dimaksud, menurut (Soepardjo Adikusumo, *Mimbar Pendidikan*, 1989:35) bahwa:

"Istilah kualitas itu jangan diartikan sempit hanya dalam pengertian ekonomi atau kemampuan intelektual. Kualitas sumber daya manusia harus dipahami dalam pengertian kesadaran manusia terhadap eksistensinya sebagai manusia; manusia yang menyadari dari eksistensi dirinya atau keberadaannya. Kesadaran akan eksistennya itu tercermin pada ikhti- untuk memperkuat ketahanan dirinya, pertama-tama agar dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan melaksanakan peranannya dalam proses berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga peranannya mempunyai makna dalam hidupnya".

Pandangan tersebut di atas mengisyaratkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama

diarahkan pada upaya penemuan jati dirinya atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang memiliki potensi.

Menghadapi perubahan kehidupan dalam masyarakat yang semakin akseleratif, maka keterandalan kualitas sumber daya manusia ini semakin dipacu agar menjadi pelaku-pelaku pembangunan yang dapat diandalkan. Jika tidak demikian, jumlah penduduk yang cukup besar ini akan menjadi beban dan tanggung jawab negara yang membawa dampak terhambatnya pelaksanaan pembangunan. (H.Siagian, 1983: 92) mengemukakan :

"Jika suatu bangsa tidak mampu mengembangkan sumber-sumber daya manusianya, negara itu tidak akan dapat membangun negaranya, karena itu pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu syarat yang paling penting bagi pembangunan".

Pandangan tersebut di atas jelas mempertegas bahwa sumber daya manusia bagi suatu bangsa mutlak harus dibina dan dikembangkan untuk dimanfaatkan demi kemajuan bangsa.

Upaya untuk membina dan mengembangkan sumber daya manusia ini diakui merupakan tugas yang cukup berat dan memerlukan keterlibatan yang sungguh-sungguh dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

#### 1. Transformasi pendidikan sebagai pemacu potensi sumber daya manusia.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan produk dari pelaksanaan pembangunan yang dinamis sesuai dengan per-

kembangan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Untuk memacu potensi sumber daya manusia Indonesia yang terus bertambah jumlahnya, pemerintah telah menetapkan sistem pendidikan secara nasional sebagaimana yang tertuang dalam Bab IV pasal 10 UUSPN yaitu :

(1) "Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.

(2) jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan bersinambungan.

(3) jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambung.

(4) pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan" (Sinar Grafika, 1991:5-6).

Dalam pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya, maka kedua sub sistem pendidikan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ke arah pencapaian tujuan pembangunan nasional. Khususnya pelaksanaan kegiatan pendidikan luar sekolah mempunyai peran strategis terutama dalam hal pengoptimalisasian potensi sumber daya manusia bagi mereka yang tidak sempat menjangkau dan terjangkau pelayanan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut undang-undang tentang sistem pendidikan nasional tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun

1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Dalam Bab II pasal

2 dikemukakan pendidikan luar sekolah bertujuan :

"1. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya;

2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan

3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah" (Panitia Seminar dan Temu Kolegial Nasional V PLS di Yogyakarta, tanpa tahun).

Upaya untuk meningkatkan martabat dan mutu kehidupan masyarakat, embrionya bertolak dari adakah kesadaran yang terinternalisasi bagi warga belajar untuk menemukan jati dirinya untuk secara mandiri dalam kebersamaan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna menjalani eksistensi kehidupannya. Kehadiran sumber dan media belajar serta perangkat lainnya merupakan instrumen pelengkap adanya kesadaran yang terinternalisasi yang merupakan indikator utama. Itulah sebabnya dalam PP 73 Bab VI pasal 10 butir (1) dikemukakan hak warga belajar yaitu :

"1. belajar secara mandiri :

2. memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang tidak wajar dari tenaga kependidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;

3. memperoleh penilaian hasil belajarnya;

4. pindah ke jalur pendidikan sekolah bilamana memenuhi persyaratan satuan pendidikan yang hendak dimasuki".

Belajar secara mandiri yang dimaksud adalah kegiatan belajar yang dilakukan atas dasar kesadaran dan prakarsa dari warga belajar tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Dengan adanya landasan yuridis formal tersebut, diharapkan pelaksanaan transformasi pendidikan dapat memacu potensi sumber daya manusia untuk bersama-sama melaksanakan membangun. Permasalahan yang cenderung muncul berkenaan dengan pelaksanaan transformasi pendidikan baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah bahwa ukuran keberhasilan lebih menitik beratkan pada pencapaian jumlah (kuantitas) keluaran dengan sejumlah pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Dengan demikian, transformasi pendidikan berlangsung dalam mekanisme input (masukan), processing (proses) dan output (keluaran) yang disebut hasil. Jika hasil yang dicapai selama ini hanya berorientasi pada pencapaian target jumlah keluaran dengan penguasaan pengetahuan dan ketrampilannya tanpa memperhatikan kemampuan untuk menerapkannya dalam masyarakat, akibatnya transformasi pendidikan sebagai pemacu potensi sumber daya manusia ke arah peningkatan kualitas tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, (Achmad Sanusi, 1983:17) mengemukakan : "Apabila membicarakan keberhasilan, berarti bukan hanya berhasil di dalam proses pembuatan input menjadi output, tetapi yang

terpenting bagaimana keadaan outcome di masyarakatnya".

Pandangan tersebut di atas, mengisyaratkan bahwa dalam proses pentransformasian pendidikan di arahkan pada bagaimana seseorang dapat menerapkan perolehan pengetahuan dan ketrampilan di dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya mengejar pencapaian target sasaran secara kuantitas, melainkan harus disertai dengan upaya "penemuan jati dirinya" sehingga seseorang mampu beradaptasi dengan perkembangan perubahan yang dinamis. Di pihak lain, pemacuan potensi sumber daya manusia melalui transformasi pendidikan bukan hanya berorientasi pada tahap "maintenance" yaitu memelihara dan mempertahankan apa yang ada sesuai dengan petunjuk dari atas (given), melainkan harus berorientasi pada pencapaian tahap "excellence" yaitu potensi-potensi yang dapat diunggulkan dalam pelaksanaan pembangunan.

### 3. Kemandirian dalam konteks pendidikan luar sekolah.

Isue hangat yang berkembang dan menjadi sentral pembahasan dewasa ini adalah masalah kemandirian. Banyak orang terjebak memaknai kemandirian dalam arti yang sempit yaitu "berdiri di atas kaki sendiri" dengan asumsi kemampuan diri adalah di atas segala-galanya tanpa memedulikan bantuan dari orang lain. Namun sesungguhnya makna esensi yang terkandung dalam pengertian kemandirian adalah kemampuan pengoptimalisasian diri dalam

kebersamaan.

Dalam konteks pendidikan luar sekolah, kemandirian yang dimaksud adalah berkenaan dengan tanggung jawab belajar orang dewasa sebagai warga belajar untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Konsep ini menurut pandangan (Stephen brookfield, 1983:27) disebut "independence learning" yaitu belajar mandiri. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan luar sekolah bukan semata-mata ditentukan oleh faktor eksternal yaitu kemampuan sumber belajar dan tersedianya fasilitas belajar, melainkan akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal warga belajar itu sendiri untuk memanfaatkan sumber dan media belajar dalam proses interaksi belajar. Dikatakan demikian, karena belajar bagi orang dewasa mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan yang dimaksud, ialah orang dewasa dalam melakukan kegiatan belajar mempunyai sejumlah pengalaman, kemampuan dan motivasi. Itulah sebabnya Rogers mengemukakan cara belajar ini dengan istilah "Student centered atau learner centered" yaitu kegiatan belajar yang terpusat pada warga belajar. Karena belajar bagi orang dewasa berkaitan erat dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka kegiatan belajar ini cenderung dilakukan dalam pekerjaannya (learning by doing) yaitu belajar sambil bekerja.

Lebih lanjut (Stephen Brookfield, 1983:x),

mengemukakan analisis konsep belajar mandiri bagi orang dewasa yaitu : "(1)Independent learning and correspondence study;(2)independence in learning;(3)self-teaching (4)self-directed learning;(5)autonomous learning;(6)independent learning as the aim of education ;(7)voluntary learning". Berdasarkan analisis tersebut, belajar mandiri bagi orang dewasa dapat berlangsung dengan cara belajar sendiri dan belajar melalui korespondensi yaitu dengan sistim paket atau modul. Adanya kemerdekaan atau kebangsaan bagi orang dewasa dalam proses kegiatan belajar, orang dewasa mengajar dirinya sendiri melalui pengalaman belajar baik yang berhasil maupun kegagalan yang pernah dialami. Dalam melakukan kegiatan belajar, orang dewasa mempunyai kemampuan untuk megarahkan diri, serta lebih bersifat otonom dalam pengambilan keputusan belajar, dan orang dewasa mempunyai kehendak sendiri untuk menetapkan tujuan pendidikan yang hendak dicapai, serta adanya kesukarelaan baginya untuk melakukan kegiatan belajar,

Bagi masyarakat petani di daerah pedesaan, konsep belajar ini sebagiannya sering dijumpai dalam pelaksanaan tugas pekerjaan mereka sehari-hari. Dengan demikian mereka dapat dengan mudah melakukan kegiatan belajar berkenaan dengan kebutuhan belajar yang diinginkan, dengan cara melakukan kegiatan interaksi belajar dengan



sumber dan media belajar yang dapat terjangkau.

4. Belajar mandiri bagi petani sebagai proses penguatan untuk memacu potensi (Empowering Process).

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan luar sekolah adalah pendekatan "Empowering Process". Menurut (Suzanne Kinder-vatter, 1979:150) mengemukakan :

"Empowering was defined as: people gaining an understanding of and control over social, economic, and/or political forces in order to improve their standing in society. An empowering process is a means to bring about such understanding and control".

Dari pandangan di atas, dapat dijelaskan bahwa empowering process merupakan suatu proses pemberian kekuatan atau kebebasan "yang bertanggung jawab" kepada seseorang atau kelompok untuk dapat berbuat sesuatu atas dasar pengertian dan pemahaman serta kesadaran terhadap struktural sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan ia dapat meningkatkan peranannya dalam masyarakat.

Strategi pelaksanaan empowering process ini meliputi : "(1) Community Organization, (2) Self-Management and Collaboration, (3) Participant Approaches, (4) Education for Justice" (:151). Karakteristik yang menjadi strategi tersebut, mempunyai misi masing-masing yaitu :

Pertama, community organization bertujuan untuk menggerakkan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan mengubah

keadaan sosial ekonomi mereka dengan jalan mengorganisasikan kelompok-kelompok sosial yang ada. Kedua, self-management and collaboration bertujuan untuk memberikan kebebasan dan wewenang untuk melibatkan semua anggota warga belajar dan sumber belajar dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian program kegiatan program pendidikan luar sekolah dalam masyarakat. Ketiga, participant approaches bertujuan memberikan peluang kepada anggota warga belajar untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan yang ditetapkan. Keempat, education for justice bertujuan memberikan kesempatan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.

Menurut Suzanne Kindervatter ( :153-154), indikator-indikator untuk terciptanya empowering process meliputi :

"(1) Small group structure, (2) transfer of responsibility, (3) participant leadership, (4) agent as facilitator, (5) democratic and non-hierarchical relationship and processes, (6) integration of reflection, (7) methods which encourage self-reliance, (8) improvement of social, economic, and/or political standing".

Upaya untuk mewujudkan pendekatan empowering process tersebut ditempuh dengan cara : (a) pembentukan kelompok-kelompok belajar yang relatif kecil jumlahnya atas dasar kesamaan minat dan bukan karena paksaan. (b) pengalihan tanggung jawab belajar secara

berangsur-angsur dari sumber belajar kepada warga belajar. (c) Mekanisme kepemimpinan diserahkan kepada kelompok belajar sehingga semua kegiatan diatur sendiri oleh kelompok. (d) peranan sumber belajar lebih bersifat fasilitator. (e) kegiatan belajar senantiasa bertolak dari pengalaman baik keberhasilan maupun kegagalan atau hambatan yang pernah dialami oleh warga belajar. (f) menggunakan metode yang benar-benar memungkinkan warga belajar terlibat secara maksimal dalam kegiatan belajar. (g) dalam pengambilan dan penetapan keputusan harus berdasarkan musyawarah bersama antar sesama anggota warga belajar dengan sumber belajar. (h) materi pelajaran sedapat mungkin diarahkan pada kebutuhan hidup sehari-hari oleh warga belajar.

Berdasarkan kajian tentang indikator-indikator penerapan empowering tersebut di atas, maka kunci empowering process menurut Suzanne Kindervatter adalah kesadaran yang terinternalisasi oleh individu atau kelompok untuk melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang dimaksud dijadikan sebagai kebutuhan yang dirasakan dan harus terpenuhi dalam rangka mengoptimalkan potensi ke arah terciptanya kondisi "self-propelling demand" (Soepardjo Adikusumo, 1992:5) yang menghargai dan memanfaatkan transformasi sebagai kebutuhan hakiki. Tanpa adanya kesadaran yang terinternalisasi

untuk menciptakan budaya belajar sebagai kebutuhan hakiki tersebut, maka proses pengadopsian nilai-nilai transformasi yang dinamis tidak mungkin akan terwujud.

Benarkah kesadaran yang terinternalisasi untuk menciptakan budaya belajar sebagai kebutuhan hakiki bagi masyarakat petani pengelola budidaya ikan mas dalam meningkatkan kelayakan hidup mereka di lokasi penelitian sudah terwujud? Indikator permasalahan ini akan dilihat dan ditelusuri lebih jauh di lapangan secara empirik.

#### 5. Perkembangan pengelolaan budidaya ikan mas di daerah propinsi Sulawesi Utara.

Tertariknya peneliti untuk mempelajari lebih mendalam tentang profil masyarakat petani untuk mempelajari pengelolaan budidaya ikan mas sebagai obyek penelitian, karena pengelolaan budidaya ikan mas di daerah propinsi Sulawesi Utara menunjukkan adanya peningkatan yang dinamis. Ini mengisyaratkan bahwa minat masyarakat terhadap konsumsi ikan mas sebagai kebutuhan pangan terus meningkat di satu pihak dan di lain pihak para petani semakin menekuni usaha budidaya ikan mas sebagai sumber pencaharian utama keluarga.

Di lihat dari prospek pengembangan usaha budidaya ikan mas pada masa yang akan datang, nampaknya memiliki prospek yang layak bagi petani, masyarakat luas maupun terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah propinsi Sulawesi Utara.

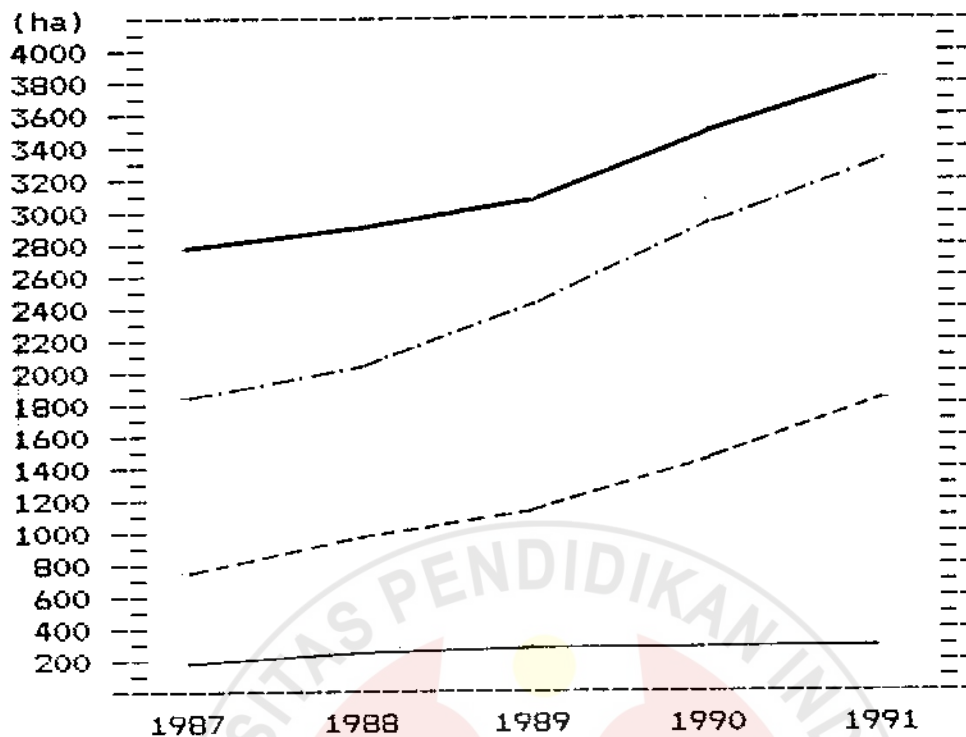
Dengan luas wilayah 27.487,63 km<sup>2</sup>, daerah ini memiliki wilayah perikanan darat seluas 1.318,23 km<sup>2</sup> atau 13.182,3 ha. Sampai dengan tahun 1991, luas areal perikanan darat yang dikelola secara intensif untuk budidaya ikan mas baru mencapai 3.817,4 ha. Ini berarti 10.182,3 ha merupakan sumber daya alam potensial yang siap menunggu untuk dikelola dan dimanfaatkan. Dengan demikian peluang perluasan areal pengembangan usaha budidaya ikan mas di daerah ini masih cukup besar. Data perkembangan luas areal pengelolaan budidaya ikan mas sejak tahun 1987 sampai dengan 1991 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1  
PERKEMBANGAN LUAS AREAL PENGELOLAAN BUDIDAYA  
IKAN MAS TAHUN 1987 S/D 1991  
(ha)

Wilayah	Tahun				
	1987	1988	1989	1990	1991
Desa Laikit	198,2	216,6	240,7	264	300
Kec. Dimembe	726,6	988,3	1126,9	1461	1826
Kab. Minahasa	1826,7	2021,3	2421,7	2961,4	3347,5
Prop. Sulut	2764,1	2912,6	3116,4	3462,4	3817,4

Sumber : Statistik Dinas Perikanan Propinsi Sulut 1991.

Dalam grafik, perkembangan luas areal pengelolaan budidaya ikan mas terlihat berikut ini.



Gambar : 1 Grafik Perkembangan luas areal pengelolaan budidaya ikan mas 1987 s/d 1991.

Keterangan :

- : Desa Laikit
- : Kecamatan Dimembe
- ..... : Kabupaten Minahasa
- : Propinsi Sulawesi Utara

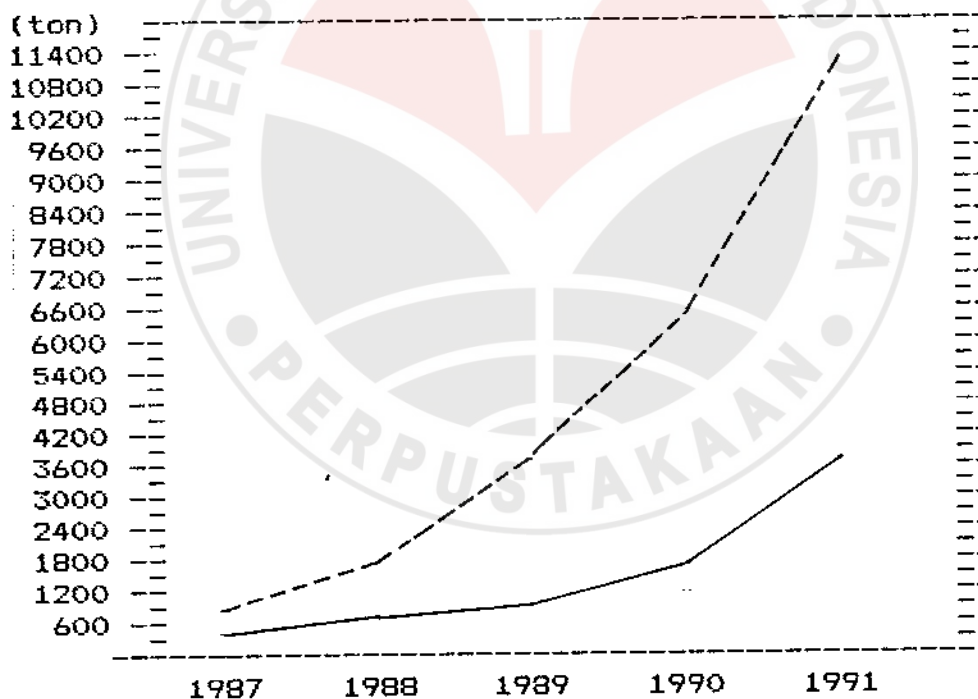
Dari data tersebut, menunjukkan bahwa perkembangan luas areal pengelolaan budidaya ikan mas dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang dinamis. Ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan produksi budidaya ikan mas. Nampaknya para petani semakin banyak yang menekuni usaha budidaya ikan mas sebagai mata pencaharian utama. Data tentang perkembangan produksi budidaya ikan mas dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2  
PERKEMBANGAN PRODUKSI BUDIDAYA IKAN MAS  
TAHUN 1987 S/D 1991 (TON)

Wilayah	Tahun				
	1987	1988	1989	1990	1991
Desa Laikit	364	676	917	1.763	3.624
Kec. Dimembe	873	1.742	3.640	6.524	11.206
Kab. Minahasa	2.813	4.026	7.460	12.911	21.009
Prop. Sulut	4.703	6.097	9.616	16.155	27.830

Sumber : Statistik Dinas Perikanan Propinsi Sulut 1991.

Dalam grafik, perkembangan produksi budidaya ikan mas di Desa Laikit dan Kecamatan Dimembe sebagai berikut.

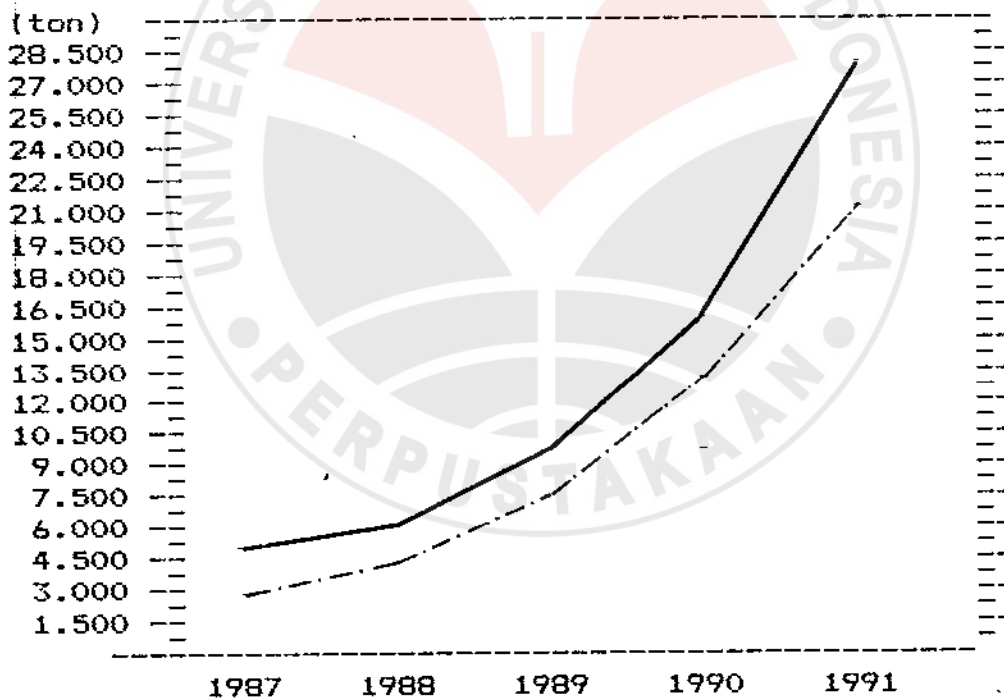


Gambar : 2 Grafik Perkembangan Produksi Budidaya Ikan Mas Desa Laikit dan Kec. Dimembe 1987 s/d 1991

Keterangan :

————— : Desa Laikit  
 - - - - - : Kecamatan Dimembe

Data tersebut, mengisyaratkan bahwa pengelolaan budidaya ikan mas di daerah ini semakin ditekuni oleh petani sebagai mata pencaharian utama. Hal ini dimungkinkan karena kesadaran masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang potensial semakin nampak. Perkembangan produksi ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi di Kabupaten Minahasa dan Propinsi Sulawesi Utara sebagaimana yang terlihat dalam grafik berikut ini.



Gambar : 3 Grafik Perkembangan Produksi Budidaya Ikan Mas Kabupaten Minahasa dan Propinsi Sulut 1987 s/d 1991.



Keterangan :

----- : Kabupaten Minahasa

----- : Propinsi Sulawesi Utara

Perkembangan produksi ini sejalan dengan kebutuhan konsumsi pangan ikan mas oleh masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini.

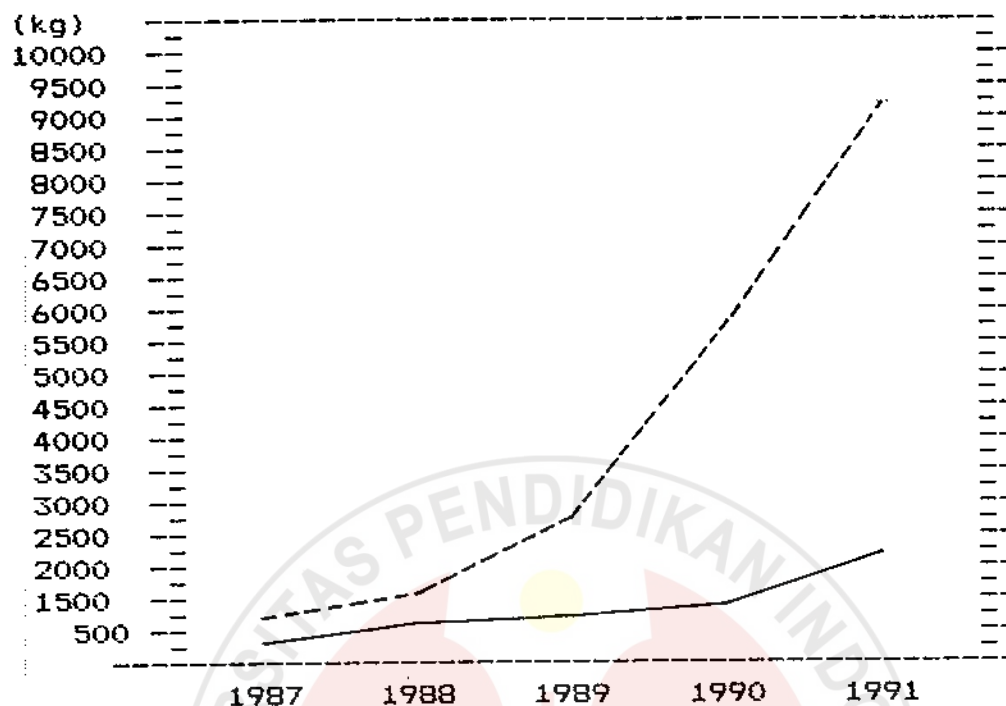
Tabel 3  
PERKEMBANGAN KEBUTUHAN KONSUMSI IKAN MAS  
TAHUN 1987 S/D 1991 (TON)

Wilayah	Tahun				
	1987	1988	1989	1990	1991
Desa Laikit	260	550	826	1.250	2.705
Kec. Dimembe	710	1.600	2.750	5.800	9.200
Kab. Minahasa	2.600	3.750	6.500	10.700	18.250
Prop. Sulut	4.500	5.800	8.400	14.600	24.500

Sumber : Statistik Dinas Perikanan Propinsi Sulut 1991.

Dari data tersebut, nampaknya perkembangan produksi budidaya ikan mas melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah yang disebabkan adanya permintaan konsumsi ikan mas dari daerah lain masyarakat Ujung Pandang, Irian Jaya, Maluku dan Kota Palu Sulawesi Tengah.

Jika ditayangkan dalam grafik, akan terlihat perkembangan kebutuhan konsumsi ikan mas di daerah Sulawesi Utara berikut ini.

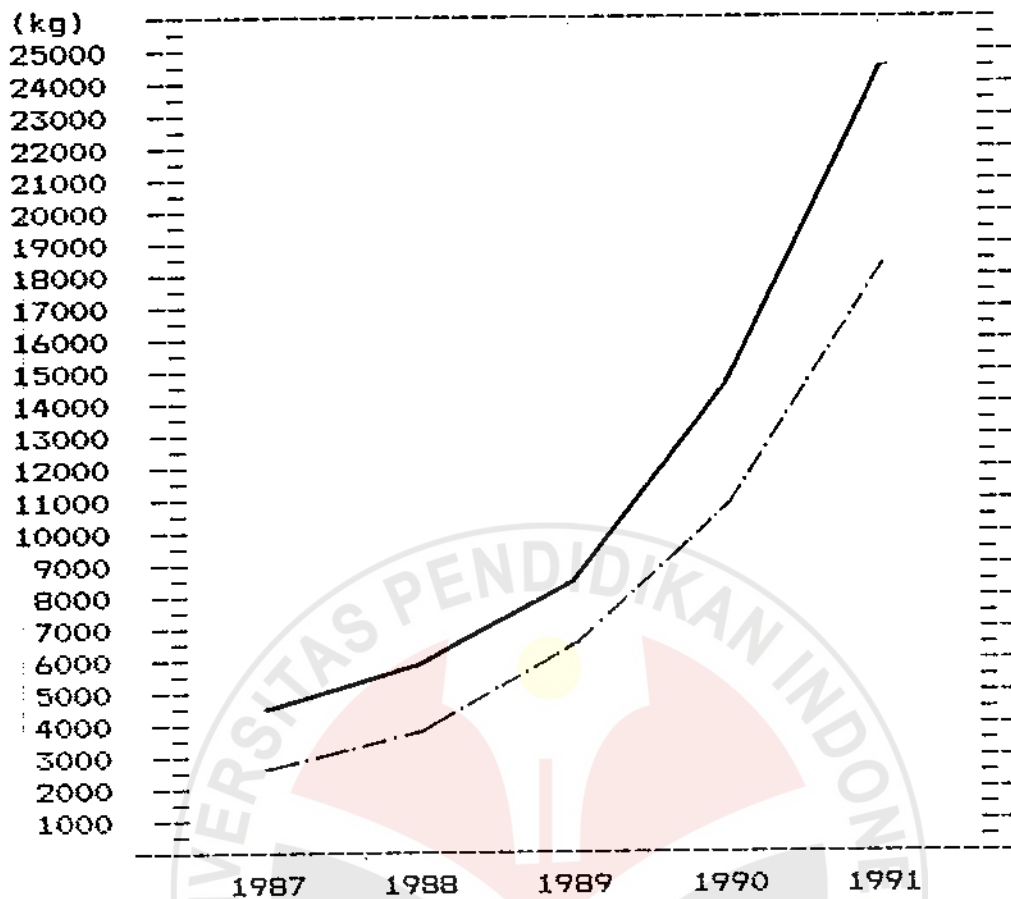


Gambar : 4 Grafik Perkembangan Kebutuhan Konsumsi Ikan Mas Desa Laikit dan Kecamatan Dimembe tahun 1987 s/d 1991.

Keterangan :

- : Desa Laikit  
 - - - : Kecamatan Dimembe

Demikian pula dengan perkembangan kebutuhan konsumsi ikan mas di Kabupaten Minahasa dan Propinsi Sulawesi Utara, menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan semakin diminatinya konsumsi ikan mas oleh masyarakat luas. Berdasarkan data pada tabel 3 tersebut jika ditayangkan melalui grafik, dapat di lihat perkembangannya sebagai berikut.



Gambar : 4 Grafik Perkembangan Kebutuhan Konsumsi Ikan Mas Kabupaten Minahasa dan Propinsi Sulawesi Utara Tahun 1987 s/d 1991.

Keterangan :

- : Kabupaten Minahasa  
 \_\_\_\_\_ : Propinsi Sulawesi Utara

Perkembangan produksi budidaya ikan mas jika dibandingkan dengan perkembangan produksi ikan laut untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di daerah ini, ternyata produksi penangkapan ikan laut masih jauh lebih tinggi dengan produksi budidaya ikan mas. Ini disebabkan karena kemampuan penangkapan ikan laut dengan menggunakan armada dan alat penangkap yang semakin

canggih di satu pihak dan di lain pihak konsumsi ikan laut di kalangan masyarakat luas masih menduduki tempat teratas. Adapun perbandingan produksi budidaya ikan mas dan produksi ikan laut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

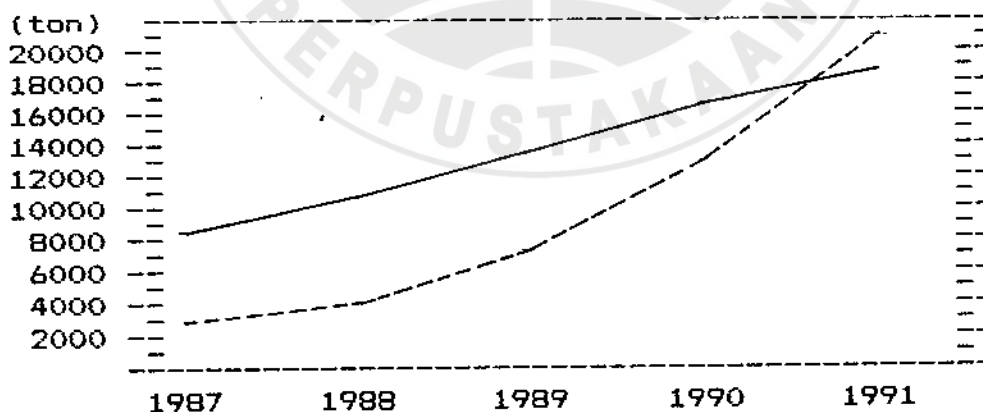
Tabel 4  
PERBANDINGAN PRODUKSI BUDIDAYA IKAN MAS DENGAN  
PRODUKSI IKAN LAUT TAHUN 1987 S/D 1991

Wilayah	Tahun				
	1987	1988	1989	1990	1991
Kab. Minahasa	* 2.813	4.026	7.460	12.911	21.006
	** 8.126	10.762	13.421	16.113	18.976
Prop. Sulut	* 4.706	6.097	9.616	16.155	27.830
	** 31.872	40.628	52.726	60.118	71.904

Keterangan : \* = Ikan Mas                      \*\* = Ikan Laut

Sumber : Statistik Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Utara Tahun 1991.

Data tersebut jika ditayangkan dalam bentuk grafik dapat di lihat sebagai berikut.

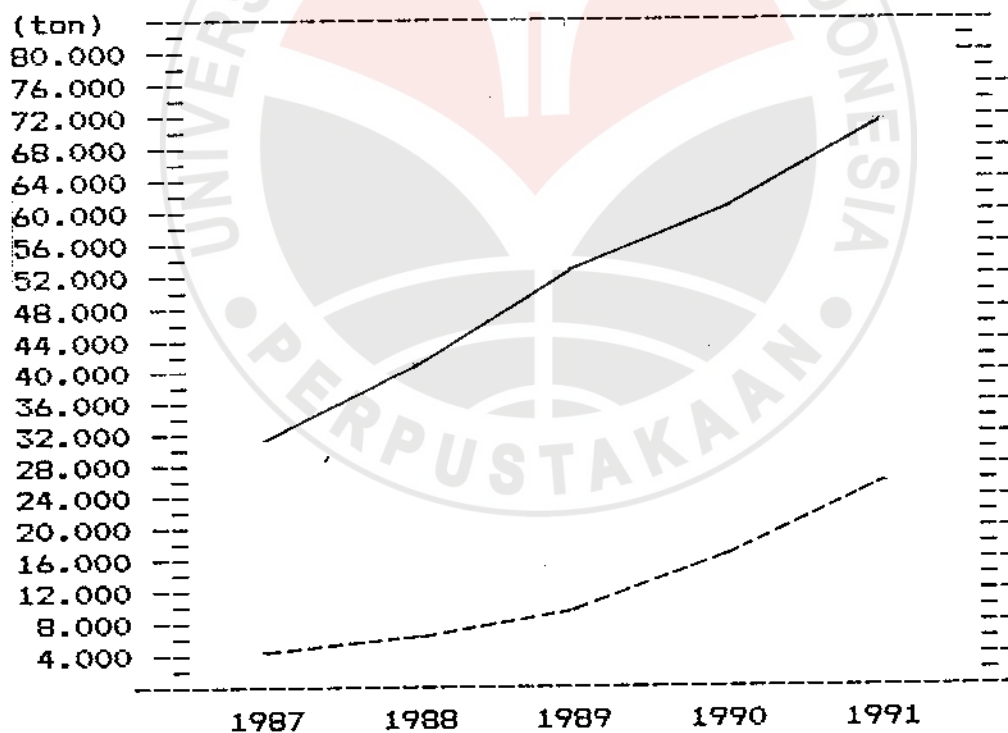


Gambar 6 : Grafik Perbandingan Perkembangan Produksi Budidaya Ikan Mas dan Produksi Ikan Laut di Kabupaten Minahasa.

Keterangan :

----- : Produksi Budidaya Ikan Mas  
 ----- : Produksi Ikan Laut

Adapun lokasi Tempat Pelelangan Ikan Laut (TPI) oleh para nelayan di Kabupaten Minahasa adalah di Kecamatan Likupang, Kecamatan Amurang, Kecamatan Belang dan Kecamatan Kauditan karena lokasinya di pesisir pantai. Sedangkan Desa Laikit dan Kecamatan Dimembe berlokasi di wilayah pertanian. Kemudian data tentang perkembangan produksi budidaya ikan mas jika dibandingkan dengan perkembangan produksi ikan laut untuk Propinsi Sulawesi Utara, dapat ditayangkan melalui grafik berikut ini.



Gambar 7 : Grafik Perbandingan Perkembangan Produksi Budidaya Ikan Mas dan Produksi Ikan Laut Propinsi Sulawesi Utara tahun 1987 s/d 1991.

Keterangan :

----- : Produksi Budidaya Ikan Mas  
 \_\_\_\_\_ : Produksi Ikan Laut

Desa Laikiti merupakan salah satu lokasi sentra pengembangan budidaya ikan mas di Kecamatan Dimembe atas prakarsa para petani itu sendiri. Tertariknya mereka menekuni usaha tersebut disebabkan oleh motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal, meliputi : pengetahuan awal tentang pengelolaan budidaya ikan mas oleh petani, wawasan berpikir masa depan, dan orientasi nilai budaya petani tentang pengelolaan budidaya ikan mas. Sedangkan motivasi eksternal meliputi : kondisi ekonomi petani, kondisi geografis, tersedianya sumber belajar dan media belajar yang memungkinkan bagi petani untuk melakukan interaksi belajar mandiri.

Motivasi tersebut di atas, berlaku juga bagi petani pengelola budidaya ikan mas di desa laikit kecamatan di membe kabupaten Minahasa Sulawesi Utara. Kondisi daerah ini memiliki faktor-faktor pendukung untuk pengelolaan budidaya ikan mas seperti : (a) sumber air bersih yang berlimpah dan tidak tergantung pada musim hujan, (b) pergantian musim kemarau dan musim hujan yang teratur pada setiap tahun yang berjalan, (c) tanahnya terkategori subur yang ditandai dengan bertumbuhnya berbagai jenis tumbuhan, (d) jarak lokasi pembudidayaan ikan mas dengan pusat pemasaran di

Kotamadya Manado kira-kira 24 km. Disamping faktor geografis tersebut, faktor kelayakan pemasaran hasil produksi ikan mas juga mendukung para petani untuk meningkatkan usahanya karena konsumsi ikan mas ini dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain telah menjadi menu harian oleh masyarakat, ikan mas ini juga menjadi makanan khas daerah Sulawesi Utara sebagai makanan pesta atau duka, serta untuk menjamu wisatawan baik domestik maupun manca negara.

Dari segi kualitas daging ikan mas ini, dapat dikatakan memberikan nilai protein yang cukup tinggi bagi peningkatan kualitas kesehatan dan kecerdasan keluarga yang mengkonsumsinya. Kualitas daging ikan mas ini dapat terjamin karena sumber air yang digunakan terkategori bersih dan belum tercemar oleh polusi baik udara maupun limbah industri dan limbah keluarga. Disamping itu, makanan yang diberikan terdiri dari sejumlah jenis tumbuhan seperti jagung, singkong, kelapa, mina padi, serta makanan "pelet" yaitu jenis makanan buatan hasil teknologi khusus untuk makanan ikan mas.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi budidaya ikan mas, sudah waktunya untuk ditingkatkan secara modern dan usaha pembudidayaan yang sifatnya tradisional sebagai kegiatan ekstraktif harus ditinggalkan menurut (Nursid Sumaatmadja, 1988:221) bahwa :

"Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil perikanan darat, dewasa ini telah diterapkan metode baru. Metode baru yang menggunakan konsep ilmu dan teknologi baru, menyangkut pembiakannya, pemeliharaannya, pemberian makanannya, dan perkolamannya. Pembiakan ikan dengan jalan disuntik, sistim kolam air deras, penyusunan komposisi makanan, dan lain-lain sebagainya sedang dikembangkan di Indonesia".

Dalam kenyataannya, penerapan metode baru ini sedang dilaksanakan untuk meningkatkan usaha pengelolaan budidaya ikan mas di lokasi penelitian. Banyak petani telah mendapat penyuluhan oleh petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan proyek percontohan Balai Benih Ikan Mas (BBI) sari Dinas Perikanan, serta dari sumber-sumber belajar lainnya. Bagi sebagian petani yang mendapat penyuluhan, terdapat perubahan dalam peningkatan usahanya. Sedangkan di pihak lain, sejumlah petani merasa ketergantungan untuk selalu didampingi oleh petugas PPL dan sulit mengembangkan usahanya secara kreatif. Oleh karena pelaksanaan penyuluhan terbatas sesuai dengan waktu, tenaga, dan target sasaran yang ditetapkan, maka konsekwensinya sebagian besar petani tidak sempat menikmati pelayanan penyuluhan tersebut. Sebagian di antara mereka pasrah pada cara pembudidayaan yang sifatnya tradisional dalam arti pengelolaan budidaya ikan mas hanya sebagai usaha sampingan. Sedangkan sebagian pula berusaha mengembangkan budidaya ikan mas dengan cara belajar mandiri. Mereka berusaha



memanfaatkan sumber belajar dan media belajar yang ada untuk melakukan interaksi belajar guna mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan budidaya ikan mas sesuai dengan perkembangan temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Dengan demikian mereka melakukan usaha pengelolaan dan pengembangan budidaya ikan mas melalui proses belajar mandiri, tanpa harus menunggu adanya penyuluhan yang terorganisir.

Untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar, proses belajar dan hasil belajar mandiri petani dalam meningkatkan usaha budidaya ikan mas, kiranya merupakan fenomena-fenomena yang perlu diteliti lebih mendalam secara kualitatif naturalistik.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul "Model Belajar Mandiri Petani dalam Meningkatkan Usaha Budidaya Ikan Mas". (Studi kasus tentang keberhasilan petani mengelola usaha budidaya ikan mas di Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara).

## **B. Permasalahan.**

### **1. Analisis Masalah**

Inti masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana para petani pengelola budidaya ikan mas dapat meningkatkan usahanya melalui proses belajar mandiri.

Suatu hal yang mengembirakan bahwa dengan adanya berbagai kegiatan penyuluhan dari petugas PPL dan ditempatkannya balai benih ikan mas di Kecamatan Dimembe, serta tersedianya sumber dan media belajar lainnya tentang pengelolaan budidaya ikan mas telah mendorong sebagian petani yang tidak sempat mendapat penyuluhan secara langsung untuk meningkatkan usahanya melalui proses belajar mandiri. Dengan perkataan lain, para petani mampu dan berusaha mengambil inisiatif sendiri dalam hal mempersiapkan diri untuk belajar mandiri.

Kesiapan belajar mandiri petani yang dimaksud, meliputi identifikasi kebutuhan belajar, menetapkan tujuan belajar, merencanakan kegiatan belajar, menentukan sumber dan media belajar, menentukan waktu belajar secara penuh, merefleksikan materi pelajaran yang diperoleh, tekad memecahkan masalah yang dihadapi secara kreatif, mengadakan penilaian sendiri dan bersedia melakukan kerja sama dengan orang lain. Sehubungan dengan itu, (Guglielmino, 1977:119) mengemukakan delapan faktor kesiapan belajar mandiri yaitu :

"(1) keterbukaan terhadap kesempatan belajar, (2) memiliki konsep diri sebagai pelajar yang efektif, (3) berinisiatif dan memiliki kebebasan dalam belajar, (4) cinta terhadap belajar, (5) kreatif, (6) memiliki orientasi terhadap masa depan, (7) mampu menggunakan ketrampilan dasar yang dipelajari, dan (8) mampu menggunakan ketrampilan dalam memecahkan permasalahan".

Dengan demikian, penelitian ini mengkaji proses belajar mandiri petani berdasarkan faktor-faktor kesiapan belajar tersebut di atas oleh petani yang tidak memperoleh penyuluhan secara langsung dari Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Utara.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis masalah tersebut di atas, penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah : "Bagaimanakah wujud model belajar mandiri petani dalam meningkatkan usaha budidaya ikan mas ?"

## 3. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian adalah :

- a. Bagaimanakah motivasi belajar mandiri petani dalam mengelola usaha budidaya ikan mas ?
- b. Bagaimanakah proses belajar mandiri petani dalam mengelola usaha budidaya iakan mas ?
- c. Bagaimanakah hasil belajar mandiri dalam meningkatkan usaha budidaya ikan mas yang meliputi :
  - 1). Peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani ?
  - 2). Peningkatan pendapatan keluarga petani ?
  - 3). Pengembangan usaha budidaya ikan mas oleh petani ?

#### 4. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang dipandang perlu penjelasan definisi operasional guna mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

##### a. Model belajar mandiri.

Dalam penelitian ini, model belajar mandiri petani yang dimaksud adalah cara belajar petani yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk berinteraksi belajar dengan sumber dan media belajar atas inisiatif sendiri. Sumber dan media belajar yang dimaksud ialah petugas PPL, petugas dan lokasi BBI, sesama petani, radio, televisi, dan buku pinter pengelolaan budidaya ikan mas. Dengan demikian, petani yang diteliti adalah mereka yang tidak sempat terlayani kegiatan penyuluhan yang diprogramkan secara langsung.

##### b. Motivasi

Motivasi yang dimaksud adalah faktor-faktor yang mendorong petani untuk melakukan kegiatan belajar mandiri. Kedalam motivasi ini meliputi motivasi internal yaitu : pengetahuan petani tentang pengelolaan budidaya ikan mas, wawasan masa depan oleh petani, dan orientasi nilai budaya petani tentang pengelolaan budidaya ikan mas. Sedangkan motivasi eksternal meliputi kondisi ekonomi petani, kondisi geografis lokasi budidaya ikan mas,

tersedianya sumber dan media belajar, dampak dan masukan lain.

c. Proses belajar mandiri

Proses belajar mandiri yang dimaksud adalah situasi berlangsungnya interaksi belajar untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan oleh petani terhadap sumber dan media belajar sampai pada upaya merefleksikan materi belajar yang diperoleh dalam pekerjaan pengelolaan budidaya ikan mas. Proses belajar ini mulai dari persiapan belajar, pelaksanaan kegiatan belajar dan evaluasi hasil belajar.

d. Hasil belajar mandiri

Hasil belajar mandiri yang dimaksud adalah peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh petani melalui proses belajar yang diwujudkan melalui perubahan perilaku dalam melakukan usaha pengelolaan budidaya ikan mas.

e. Peningkatan usaha

Peningkatan usaha yang dimaksud ialah adanya nilai tambah baik jumlah maupun mutu hasil pengelolaan budidaya ikan mas yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani, melalui proses belajar mandiri sesuai dengan perkembangan temuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **f. Petani pengelola budidaya ikan mas**

Petani pengelola budidaya ikan mas yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kepala keluarga sebagai anggota masyarakat yang memiliki mata pencaharian utama sebagai petani pemelihara ikan mas.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan umum**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menemukan model belajar mandiri petani dalam meningkatkan usaha budidaya ikan mas di Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, sebagai cakupan kegiatan pendidikan luar sekolah.

#### **2. Tujuan khusus**

Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis motivasi, proses dan hasil belajar mandiri petani dalam meningkatkan usaha budidaya ikan mas.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara konseptual teoritis maupun bermanfaat secara praktis di lapangan.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian dalam rangka pengembangan kompetensi profesional pendidikan luar sekolah khususnya

wawasan tentang konsep belajar mandiri bagi orang dewasa sebagai cakupan kegiatan pendidikan orang dewasa (andragogi).

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi perencana dan pelaksana program kegiatan pendidikan luar sekolah khususnya pihak Dinas Perikanan dalam rangka pengembangan pelaksanaan program balai benih ikan mas dan peningkatan pelayanan penyuluhan oleh petugas PPL. Demikian juga bagi pemerintah setempat berkenaan dengan perencanaan pemanfaatan potensi sumber daya alam khususnya daerah sawah yang merupakan sumber potensi desa untuk kepentingan pembangunan masyarakat Desa Laikit melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Dengan demikian temuan yang diharapkan melalui penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran yang seyogiannya dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan konsep pendidikan khususnya pendidikan luar sekolah untuk memacu kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam konteks pembangunan.